



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

MEDIA
radar

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	----------	----------------	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

Pembab Morut Akan Klarifikasi ke BPK

Indikasi Kerugian Negara pada Dana Representasi

MOROWALI - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan berkoordinasi sekaligus klarifikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (15/5) pekan depan. Klarifikasi ini terkait temuan indikasi kerugian daerah akibat dana Representasi perjalanan dinas tahun anggaran 2016.

Langkah tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara Valbert Tulaka saat menghadiri Rapat Salung Jumat (12/5) sore. "Terkait hingga ini kita sudah rapat itu masih ada beberapa hal belum selesai final. Kaitannya BPK kemarin kita melakukan klarifikasi," kata Valbert via sambungan telepon.

Valbert menjelaskan, indikasi kerugian daerah tersebut disebabkan oleh prosedur secara Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) dengan BPK. Hal ini terkait penjabaran Peraturan Bupati Morowali Utara No.26/2015 tentang standar biaya umum (SBU) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Morowali Utara TA 2016. "Kalau permasalahan tersebut yang regulasi itu maknanya terjadi indikasi kerugian. Nah masalah ini yang harus kita cek," jelas dia.

Agar tidak berujung kerugian kepada pihak pengambil alih representasi maupun kepada daerah yang lanjutnya menyekatkan dana itu, Valbert memesankan klarifikasi nanti tidak akan selesai dari jawaban yang ditentikan. "Proses klarifikasi di kota Palu ini sudah saya laporkan ke Bupati Aprilio, sehingga perbaikan paham itu bisa segera selesai," tandanya.

Dia menambahkan, selain klarifikasi di atas, Pemkab Morowali juga sedang melakukan klarifikasi di BPK soal dana bantuan ke sekolah luar biasa sehingga sekolah tersebut ada di kabupaten ini. "Seperti ini data SLB itu sampai bantuan langsung, bukan seperti biaya karena melaks di Dinas Pendidikan," pungkas Valbert.

Sementara itu, dibicarakan, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian daerah atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2016 senilai Rp2 miliar lebih. Indikasi kerugian daerah ini akibat pembelan uang representasi dari kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan Sekretariat DPRD, Bagian Umum Sekretariat Daerah serta OPD di lingkungan Pemkab Morowali Utara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Salung jumlahnya mencapai Rp2 miliar lebih. Dari laporan tersebut Rp200 an juta dan eksekutif kurang lebih Rp1,8 miliar.

Di: Radar PERWAL, HAL 19

KAR.
Semburan dan hal 20

perbedaan cara pandang tentang Perbup terkait. Beda pemahaman regulasi terletak pada pengertian perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Jika Pemkab mengartikan dalam daerah adalah di wilayah kabupaten, maka

Tengah. Sementara untuk perjalanan luar daerah ditekankan adalah perjalanan dinas antar kabupaten atau keluar dari wilayah Morowali Utara, justru BPK menganggapnya adalah perjalanan dinas antar provinsi.

Radar Salung kemarin mengungkapnya berdasarkan Perbup Morowali Utara No.46/2014, Perbup Morowali Utara No.26/2015 serta Perbup Morowali Utara No.42/2016. Ketiga Perbup tersebut berisi tentang SBU APBD kabupaten Morowali Utara TA 2014, TA 2016 serta TA 2017.

Untuk diketahui, dalam Perbup Morowali Utara No.10/2014 tentang SBU APBD kabupaten Morowali Utara TA 2014, uang representasi per hari dalam daerah untuk bupati, wakil bupati, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar Rp125 ribu dan luar daerah Rp250 ribu per hari. Sementara untuk pejabat eselon II dan anggota DPRD, uang representasi harian dalam daerah yakni Rp75 ribu dan Rp150 ribu untuk luar daerah.

Untuk mengetahui isi ketentuan Perbup Morowali Utara No.42/2016 tentang SBU APBD kabupaten Morowali Utara TA 2017.

Pada Perbup terakhir yang diundangkan pada 29 Desember 2016 ini, uang representasi harian dalam daerah - Sementara itu, jika di luar daerah, limitasi dari jabatan bupati sebesar Rp600 ribu dan wakil bupati Rp500 ribu dan wakil ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Rp400 ribu. Sedangkan untuk anggota DPRD, uang representasi harian dalam daerah untuk wakil bupati atau Rp100 ribu lebih banyak dari sekoran daerah yang ditetapkan sebesar Rp300 ribu.

Rincian uang representasi harian dalam daerah untuk bupati masing, Rp200 ribu untuk pejabat eselon II dan anggota DPRD. Sementara eselon III sebesar Rp250 ribu dan Rp100 untuk eselon

IV. Namun di Perbup ketiga di atas ada perbedaan yang mengena yang memuat kata yang diberikan jika perjalanan dinas dalam daerah dilakukan lebih dari 10 jam.

Pada pengertian uang representasi harian luar daerah untuk bupati sebesar Rp600 ribu atau Rp500 untuk wakil bupati. Selain itu untuk anggota DPRD, uang representasi harian dalam daerah sebesar Rp100 per hari juga berbeda untuk sekoran daerah dan eselon eselon II, III dan IV serta anggota DPRD.

Dari pembahasan ini Radar Salung kemarin mendapat informasi dari Pemkab Morowali Utara yang sudah mengartikan dan berujung penggantian pejabat yang menjabat sebagai wakil bupati (DPRD) kabupaten Morowali Utara sebagai pejabat (DPRD) Kabupaten Morowali Utara.